



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 9934-9944

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak ( LKSA ) Melati Aisyiyah Wilayah Sumatera Utara

Raslina Solin<sup>1✉</sup>, Kamila<sup>2</sup>, Nurul Jannah<sup>3</sup>

Universitas Islam Sumatera Utara

Email: [raslinasolin1@gmail.com](mailto:raslinasolin1@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Tujuan penelitian ini mengetahui bagaimana Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak ( LKSA ) Melati Aisyiyah Wilayah Sumatera Utara. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Penelitian menghasilkan data Deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang perilaku yang dapat diamati. Adapun subjek penelitian ini adalah pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Melati Aisyiyah Wilayah Sumatera Utara. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Penerapan transparansi dan akuntabilitas terhadap laporan keuangan LKSA Melati Aisyiyah Wilayah Sumatera utara terlaksana cukup baik, dibuktikan dengan adanya laporan keuangan setiap bulan yang di sampaikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan seperti Pimpinan, Donatur dan masyarakat. Untuk transparansi dapat dilihat dari terbukanya akses informasi yang dengan mudah di dapatkan melalui media sosial, website ataupun meliha secara langsung. 2 pada laporan keuangan LKSA Melati Aisyiyah Wilayah Sumatera utara belum menerapkan atau membuat laporan keuangan sesuai dengan konsep ISAK No. 35 dikarenakan dalam organisasi Aisyiyah sudah mempunyai standar pelaporan keuangan sendiri sehingga tidak menerapkan ISAK No 35 dan bendahara juga mengakui keterbatasan pengetahuan Pengurus LKSA Melati Aisyiyah Wilayah Sumatera Utara mengenai bagaimana laporan keuangan yang sesuai dengan ISAK No 35 Tersebut.

Kata Kunci : *Transparansi, Akuntabilitas Dan Laporan Keuangan*

## Abstract

The purpose of this study is to find out how the Transparency and Accountability of Non-Profit Financial Organization Reports in the Child Welfare Institution (LKSA) Melati Aisyiyah, North Sumatra Region. The type of data used in this research is qualitative research. Research produces descriptive data in the form of written or spoken words from observable people's behavior. The subject of this research is the management of the Melati Aisyiyah Child Social Welfare Institution (LKSA) for the North Sumatra Region. Data collection techniques in this study using observation techniques, interviews and documentation. The results of this study indicate that 1. The application of transparency and accountability to the financial reports of LKSA Melati Aisyiyah for the North Sumatra Region has been implemented quite well, as evidenced by the monthly financial reports submitted to parties who need financial reports such as leaders, donors and the community. Transparency can be seen from the openness of access to information which is easily obtained through social media, websites or seeing it in person. 2 on the financial reports of LKSA Melati Aisyiyah for the North Sumatra Region have not implemented or made financial reports in accordance with the concept of ISAK No. 35 because the Aisyiyah organization already has its own financial reporting standards so that it does not apply ISAK No. 35 and the treasurer also recognizes the limited knowledge of the LKSA Melati Aisyiyah Management for the North Sumatra Region regarding how financial reports are in accordance with ISAK No. 35.

*Keywords: Transparency, Accountability And Financial Statements*

## PENDAHULUAN

Organisasi dapat dipahami sebagai wadah perkumpulan banyak orang untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh sebab itu, organisasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan pada kehidupan bermasyarakat. Terdapat banyak jenis organisasi di Indonesia salah satunya adalah organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba merupakan organisasi yang tidak mementingkan pendapatan suatu laba atau keuntungan saat melaksanakan kegiatannya. Organisasi ini lebih bertujuan untuk mengutamakan kepentingan masyarakat umum. (Munte & Rahmah, 2017). Organisasi nirlaba baik lembaga Swadaya masyarakat (LSM) maupun Non-Governmental Organization (NGO) dibuat dengan tujuan meringankan penderitaan, mengentaskan kemiskinan, memelihara lingkungan hidup, menyediakan layanan sosial dasar atau melakukan aktivitas pengembangan masyarakat. Organisasi nirlaba ini pula dibentuk oleh sekumpulan masyarakat rakyat berdasarkan nilai-nilai sosial yang hidup di dalam masyarakat, serta didukung oleh adanya kepedulian terhadap nasib sesama manusia baik dalam bidang sosial, politik, budaya, pendidikan dan kesehatan. Organisasi nirlaba pula sebagai ujung tombak perubahan sosial, melalui perubahan dari kepentingan pribadi menjadi kepentingan publik. (Wiratnadi et al., 2019).

Organisasi nirlaba yaitu wujud dari organisasi masyarakat yang berjalan berasal masyarakat kembali pada masyarakat itu sendiri dan dituntut untuk dapat menyajikan laporan keuangan secara transparan serta mampu dipertanggung jawabkan.(Purba et al., 2022). Terkait dengan konsep akuntabilitas dimana akuntansi menjadi sarana pertanggungjawaban akuntabilitas, maka laporan keuangan perlu disajikan oleh organisasi nirlaba. sehingga dengan adanya laporan keuangan pengguna laporan keuangan dapat menilai kinerja pengurus atas tugas serta kewajiban. Selain itu dengan adanya laporan keuangan yang jelas serta transparan dapat memberikan kemudahan kepada para pengurus untuk menghasilkan sebuah pertanggung jawaban kepada pengguna laporan. Didalam Organisasi Nirlaba tidak akan terlepas dari aspek keuangan, walaupun tidak melihat pada untung namun aspek keuangan sangat penting untuk diperhatikan.(Hasanah, 2019).

Laporan keuangan organisasi nirlaba sendiri memiliki tujuan, yaitu menilai kemampuan organisasi serta menyajikan informasi. Laporan keuangan ini mempunyai kepentingan bersama pada rangka menilai beberapa hal. seperti, jasa yang diberikan oleh organisasi nirlaba dan kemampuannya untuk menyampaikan jasa tersebut, dan cara manajer melaksanakan tanggung jawabnya dan aspek lain asal kinerja mereka. Tanpa kita sadari dalam kehidupan sehari-hari sekarang semakin banyak organisasi nirlaba yang didirikan, baik itu dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan lain-lainya. Perkembangan yang pesat ini terjadi dikarenakan kebutuhan warga serta organisasi nirlaba yang semakin berkembang.(Mursidi, 2020)

Organisasi nirlaba tentu juga memiliki kewajiban dalam hal pertanggungjawaban pengelolaan, melalui penerbitan laporan keuangan menjadi suatu ukuran kinerja organisasi, seperti halnya dengan organisasi bisnis. sudah seharusnya penyusunan dilakukan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan standar pelaporan keuangan yang berlaku umum , karena melihat betapa pentingnya peran laporan keuangan pada suatu organisasi. Standarisasi pelaporan keuangan menjadi penting, supaya ada kesamaan ukuran pada menilai kelayakan suatu pelaporan keuangan.

Laporan keuangan yang baik dan benar adalah yang sesuai dengan SAK yang berlaku umum. SAK yang mengatur tentang penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada entitas nirlaba adalah ISAK No. 35 yang disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAT) pada tanggal 28 September 2018 yang menjelaskan bahwa penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non laba.(Ikatan Akuntansi Indonesia, 2007) Laporan keuangan organisasi non laba meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset

neto, laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan, dan catatan atas laporan keuangan.

Salah satu organisasi nirlaba (Non Profit) adalah Panti Asuhan atau sekarang disebut dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). LKSA ini Merupakan salah satu organisasi nirlaba yang berada dalam kalangan masyarakat yang bergerak untuk pengentasan kemiskinan dan anak terlantar. Anak merupakan makhluk sosial yang dapat dikatakan rentan dan lemah sehingga memerlukan perlindungan dan bantuan dari orang dewasa untuk dapat membimbing dan merawat mereka. Umumnya, orang dewasa yang memiliki hak untuk menjaga anak adalah orang tua atau orang lain yang memiliki hubungan darah/biologis atau secara hukum dapat disebut sebagai keluarga. Di beberapa kondisi, seorang anak tidak bisa mendapatkan hak atas perlindungan dari keluarga sehingga seorang anak tersebut memerlukan alternatif perlindungan lain. Alternatif perlindungan ini dapat diperolehnya dari negara maupun swasta melalui yaitu salah satunya Panti Asuhan atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).

Lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) dapat diartikan sebagai rumah, tempat, atau kediaman yang digunakan untuk memelihara (mengasuh) anak yatim, piatu, yatim piatu, dan juga termasuk anak terlantar. Santoso memberikan pengertian sebuah panti asuhan sebagai suatu lembaga yang sangat terkenal untuk membentuk perkembangan anak-anak yang tidak memiliki keluarga ataupun yang tidak tinggal bersama dengan keluarga. Jadi LKSA ini merupakan salah satu lembaga perlindungan anak yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap hak anak-anak sebagai wakil orang tua dalam memenuhi kebutuhan mental dan sosial pada anak asuh agar mereka memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri sampai mencapai tingkat kedewasaan yang matang serta mampu melaksanakan perannya sebagai individu dan warga negara.

Salah satu organisasi nirlaba (Non Profit) yang menjadi fokus penelitian ini adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Melati Aisyiyah Wilayah Sumatera Utara, yang beralamat di Jalan Masjid Raya Al-Firdaus No. 806 Pasar 9 Tembung Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. Dalam pelaksanaan seluruh kegiatan LKSA termasuk operasionalnya, pembangunan atau renovasi LKSA dan lain lain sebagainya, memperoleh dukungan pendanaan dari berbagai pihak, baik pihak swasta, organisasi dan donatur yang terikat maupun yang tidak terikat. Jadi Pengurus LKSA wajib melakukan pencatatan dana agar dapat mengontrol dana masuk dan juga dana keluar. Karena dana yang diperoleh dari donasi tidak digunakan untuk memperoleh keuntungan, namun seluruh dana tersebut digunakan untuk keperluan operasional LKSA. Jadi Kegiatan seperti ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban terhadap orang-orang yang telah memberikan sumbangan dalam keberlangsungan oprasional LKSA. Sama halnya dengan tujuan instansi

sektor publik lainnya yaitu seluruh asset yang terdapat di LKSA wajib di catat oleh pengurus. Jadi sebenarnya kunci keberhasilan untuk menjaga keberlangsungan hidup dan kemakmuran LKSA adalah dengan menyajikan catatan dana yang transparan dan akuntabel. Agar dana tersebut tidak disalah gunakan oleh pengurus, maka perlu adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya, Oleh sebab itu diperlukan adanya laporan keuangan. Selain untuk mencegah penyalahgunaan dana, laporan keuangan juga berfungsi bagi para donatur dan pengguna laporan keuangan lainnya untuk melakukan pengawasan dana yang sudah diberikan telah mencapai sasaran yang ditetapkan.(Purba et al., 2022)

Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban atas segala hal yang dilakukan oleh penerima amanat dan merupakan suatu prinsip yang menjamin bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seseorang ataupun organisasi dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Sementara Transparansi adalah pengungkapan lembaga atau otoritas pada publik dan pemangku kepentingan menerima informasi yang akurat, jujur, dan adil serta memiliki akses yang mudah dan keterbukaan dalam menginformasikan laporan keuangan kepada publik, contohnya memberikan informasi dengan menggunakan website.(Nasution et al., 2022) Akuntabilitas dan transparansi yang baik dapat dilihat melalui tiga unsur yakni pertanggungjawaban dana publik, ketepatan waktu dalam penyajian dan adanya pemeriksaan atau audit yang baik dari internal maupun eksterna.(Andreani & Syafina, 2022)

Namun nyatanya Tuntutan akan akuntabilitas untuk organisasi nirlaba khususnya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) bukanlah hal yang mudah. Sering sekali pengelola khususnya bendahara sebuah lembaga sosial adalah seseorang yang punya pengalaman dalam bidang akuntansi bisnis, tapi tidak memiliki keterampilan khusus dalam akuntansi. Pengurus lembaga mengharapkan bendahara keuangan dapat menangani keuangan secara layak, meskipun mereka mungkin memiliki sedikit pengetahuan dalam akuntansi dan pada praktek bagian keuangan masih belum memahami bagaimana konsep yang seharusnya dapat lebih baik untuk dilakukan. Yang mana akan menyebabkan ketidaksesuaian dengan apa yang seharusnya dilakukan yaitu sesuai dengan konsep ISAK No 35.

Beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan organisasi nirlaba yaitu penelitian yang dilakukan oleh Budi Prihatminingtyas, Dkk ( 2021) dengan judul "Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Panti Asuhan Al-Maun Desa Ngajum Kabupaten Malang". Dimana hasil penelitian mengatakan bahwa Laporan keuangan panti asuhan al-maun desa ngajum kabupaten malang masih belum sesuai dengan PSAK No.

45, karena laporan keuangan hanya sebatas pemasukan dan pengeluaran kas, selain itu masih belum tergolong akuntabel, karena kurangnya pemahaman pengelola panti asuhan tentang manajemen keuangan, namun sudah tergolong transparan yang sederhana. Penelitian Selanjutnya juga dilakukan oleh Novita Alaika Sari Dkk (2022) yang berjudul "Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Pada Masjid Sabilillah Di Kota Malang Berdasarkan ISAK 35" Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya Masjid Sabilillah telah menerapkan beberapa bentuk akuntabilitas dan juga transparansi, mulai dari bentuk perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggung jawaban keuangan sudah dilakukan secara terbuka dihadapan para jamaah dan juga pimpinan. Namun terkait dengan laporan keuangan yang dibuat masih belum berpedoman pada ISAK 35 dan masih mengacu pada standar yang lama.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Melati Aisyiyah Wilayah Sumatera Utara, LKSA tersebut telah membuat laporan keuangan dengan maksimal di mana bendahara LKSA setiap bulan melaporkan keuangan kepada ketua LKSA dan setiap tiga bulan sekali melaporkan kepada Pimpinan Wilayah Aisyiyah Sumatera Utara, untuk menjadi pertanggungjawaban pengurus LKSA kepada Pimpinan Wilayah Aisyiyah Sumatera Utara.

*"Untuk laporan keuangan LKSA atau amal usaha lainnya, ketentuan pelaporannya tiap bulan dilaporkan kepada ketua LKSA dan tiga bulan sekali dilaporkan ke Pimpinan Wilayah Aisyiyah dan untuk laporannya hanya melaporkan pemasukan dan pengeluaran LKSA nya saja."* (Hasil Wawancara dengan Ibu Sarah Sandra selaku bendahara LKSA, tanggal 06 Maret 2023).

Namun sampai saat ini belum diketahui bagaimana transparansi/keterbukaan LKSA kepada para donatur dan masyarakat umum mengenai Laporan Keuangan LKSA tersebut dan apakah LKSA Melati Aisyiyah Wilayah Sumatera Utara dalam pelaporan keuangannya sudah sesuai dengan ISAK No 35 atau belum. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Melati Aisyiyah Wilayah Sumatera Utara"

#### METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak ( Lksa ) Melati Aisyiyah Wilayah Sumatera Utara. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif yang mendeskripsikan data menggunakan rangkaian kalimat. Sifat penelitian yang akan dilakukan peneliti bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang memaparkan secara rinci tentang suatu objek yang diteliti. Dalam penelitian ini metode studi yang digunakan adalah studi

kasus, yang berusaha menjaga keutuhan objek penelitian. Penelitian ini mengacu pada sumber data yang dikumpulkan dari kunjungan langsung ke objek penelitian, dalam hal Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Melati Aisyiyah Wilayah Sumatera Utara, Sekretaris Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Melati Aisyiyah Wilayah Sumatera Utara dan Bendahara Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Melati Aisyiyah Wilayah Sumatera Utara, serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Untuk mengumpulkan data yang akurat, digunakan pendekatan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data penelitian. Proses analisis data peneliti meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan kombinasi triangulasi teknik dan triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data dan menganalisis data berdasarkan sumber data

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Transparansi Laporan Keuangan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Melati Aisyiyah Wilayah Sumatera Utara

Setiap laporan keuangan yang disusun oleh organisasi baik organisasi bisnis, maupun non bisnis perlu dilakukan secara transparansi. Termasuk dalam pelaporan keuangan LKSA Melati Aisyiyah Sumatera Utara. Transparansi menjadi tuntunan dalam pengelolaan keuangan pada organisasi nirlaba. Atmaja (2013) menyatakan transparansi sebagai bentuk keterbukaan organisasi untuk menyediakan informasi yang relevan dengan cara yang mudah di akses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Transparansi akan berjalan dengan baik, apabila pihak pemberi dan yang diberi amanah berimana dan bertaqwa kepada Allah SWT. Dengan berimana dan bertaqwa, keduanya akan saling menjaga hak dan kewajiban dan tanggungjawab masing-masing. Transparansi memiliki arti keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran. Transparansi atau keterbukaan adalah prinsip untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan diskriminatif tentang penyelenggaraan organisasi dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Transparansi dalam pengelolaan keuangan organisasi nirlaba sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat, donatur dan pimpinan.

Transparansi dalam penelitian ini berarti adanya keterbukaan informasi terkait dengan seluruh kegiatan atau pun laporan keuangan yang mudah di akses oleh siapa saja yang berupa keterbukaan sumber dana beserta jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawaban harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang

berkepentingan untuk mengetahuinya. Dan di era digitalisasi saat ini terjadi perubahan yaitu pemberian informasi yang dilakukan secara digital, Terdapat banyak jenis yang dimanfaatkan LKSA seperti website untuk menjalin komunikasi terhadap masyarakat, oleh sebab itu dibutuhkan digitalisasi untuk memperoleh transparansi dan akuntabilitas. (Irwan et al., 2020)

Dari pendapat di atas menunjukkan bahwa LKSA sudah transparansi yaitu informasi yang dapat diakses oleh siapa saja karena kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di LKSA dapat dilihat melalui media sosial, website ataupun melihat secara langsung di LKSA dan untuk Laporan keuangan LKSA yaitu disampaikan saat melaksanakan rapat rutin bulanan dimana seluruh pengurus wajib hadir dan harus mengetahui laporan keuangan LKSA tersebut dan untuk kepada pimpinan Aisyiyah Wilayah Sumatera Utara disampaikan tiga bulan sekali.

#### Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Melalui Aisyiyah Wilayah Sumatera Utara

Akuntabilitas dalam perspektif Islam tidak hanya ditujukan kepada masyarakat melainkan juga pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Kata akuntabilitas berasal dari *account* (hitung). Dalam agama Islam, setiap perbuatan yang dilakukan di dunia akan dihisab (hitung) walaupun sebesar biji dzarrah di khirah kelak. Islam memiliki pandangan bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban seseorang manusia sebagai khalifah di bumi kepada sang pencipta, karena apapun yang telah dititipkan kepada manusia adalah amanah dan setiap manusia harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakan. Akuntabilitas juga terkait dengan peran sosial bahwa meyakini hukum syariah telah dilaksanakan dan kesejahteraan umat menjadi tujuan utama dari aktivitas sebuah organisasi.

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pemimpin suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban, meliputi keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan Misi Instansi yang bersangkutan (Siahaan 2012). Dalam menjaga akuntabilitasnya LKSA Melalui Aisyiyah Wilayah Sumatera Utara melaksanakan 3 tahap pelaksanaannya yaitu perolehan dana, pemanfaatan dana dan pencatatan dana dilakukan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan baik kepada pemerintah, donatur, maupun pihak lain yang memerlukannya. Walaupun pengelola LKSA Melalui Aisyiyah Wilayah Sumatera Utara tidak memiliki kompetensi akuntansi secara khusus, akan tetapi pengelola juga berusaha maksimal untuk dapat menyajikan laporan pengelolaan dana secara terperinci sesuai

kondisi ril dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penerapan akuntabilitas dapat dilihat dari pencatatan dan pelaporan. Akuntabilitas dalam pencatatan LKSA dilihat dengan adanya dokumentasi dan informasi dalam pengelolaan dana sudah diterapkan di LKSA Melati Aisyiyah Wilayah Sumatera Utara, hal ini sesuai dengan pendapat bendahara LKSA bahwa beliau mengatakan di LKSA tersedia dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan dana seperti laporan pertanggungjawaban anggaran kegiatan yang disertai dengan adanya bukti fisik seperti kwitansi. Akuntabilitas dalam pelaporan keuangan dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada donatur, masyarakat dan orang yang berkepentingan dan laporan tersebut di buat oleh bendahara LKSA. Dan laporan pertanggungjawaban tersebut di samapaikan setiap bulan. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh ketua dan bendahara lksa, bahwa setiap organisasi nirlaba ataupun organisasi non nirlaba haruslah amanah serta bertanggungjawab penuh dalam membuat laporan sesuai dengan format dalam buku pedoman dari pimpinan pusat Aisyiyah.

Dari pendapat diatas menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan dana LKSA Melati Aisyiyah Wilayah Sumatera Utara sudah cukup baik dengan adanya dokumen-dokumen dari setiap pengeluaran dan pemasukan dari para donatur dan masyarakat, kemudian pemberian informasi kepda pihak yang berkepentingan mengenai informasi dan juga kegiatan pelaporan mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapka oleh pimpinan.

Kesesuaian Laporan Keuangan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Melati Aisyiyah Wilayah Sumatera Utara Dengan ISAK No. 35

Dari hasil analisis laporan keuangan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Melati Aisyiyah Sumatera Utara dapat diketahui kesesuaian laporan keuangan tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku pada ISAK NO 35. Sebuah organisasi nirlaba perlu setidaknya menyusun lima jenis laporan keuangan, diantaranya yaitu laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan (CALK).

Namun berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi laporan keuangan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Melati Aisyiyah Sumatera Utara belum menerapkan dan belum sesuai dengan ISAK No 35 karena mereka hanya melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran secara manual. Jadi dapat disimpulkan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Melati Aisyiyah Sumatera Utara masih membutuhkan pemahaman mengenai manajemen keuangan dan penyusunan

laporan keuangan berdasarkan ISAK NO 35.

## SIMPULAN

Penerapan transparansi terhadap laporan keuangan LKSA Melati Aisyiyah Wilayah Sumatera utara terlaksana secara baik, dapat dilihat dari cara pengurus LKSA menyampaikan informasi mengenai kegiatan-kegiatan maupun laporan keuangannya. Kegiatan-kegiatan yang di laksanakan di LKSA dapat dilihat melalui media sosial, website ataupun meliha secara langsung di LKSA karena mereka membuat seperti papan mading dimana semua kegiatan terlihat jelas di laksanakan. Sementara Laporan keuangan LKSA yaitu di sampaikan saat melaksanakan rapat rutin bulanan dimana seluruh pengurus wajib hadir dan harus mengetahui laporan keuangan LKSA tersebut dan untuk kepada pimpinan Aisyiyah Wilayah Sumatera Utara di sampaikan tiga bulan sekali. Penerapan akuntabilitas terhadap laporan keuangan LKSA Melati Aisyiyah Wilayah Sumatera Utara berjalan cukup baik dibuktikan dengan adanya laporan keuangan setiap bulan yang disusun oleh pihak pengurus dan mereka juga menyatakan adanya pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut seperti masyarakat dan donatur tetap.

Kesesuaian Laporan Keuangan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Melati Aisyiyah Wilayah Sumatera Utara Dengan ISAK No. 35. Pada laporan keuangan LKSA Melati Aisyiyah Wilayah Sumatera Utara belum menerapkan ISAK No. 35 dikarenakan dalam organisasi Aisyiyah sudah mempunyai standar pelaporan keuangan sendiri sehingga tidak menerapkan ISAK No 35 dan bendahara juga mengakui keterbatasan pengetahuan Pengurus LKSA Melati Aisyiyah Wilayah Sumatera Utara mengenai bagaimana laporan keuangan yang sesuai dengan ISAK No 35 Tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Teknologi Informasi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Deli Serdang. 1(2), 203–  
Andreani, Y., & Syafina, L. (2022). Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Berbasis 209.
- Hasanah, B. N. (2019). Penyusunan laporan keuangan berdasarkan psak no.45 pada panti asuhan 'aisyiyah nganjuk. 45.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2007). Standar Akuntansi Keuangan. Salemba 4.
- Irwan, M., Nasution, P., & Kamilah, K. (2020). Face Recognition Login Authentication for Digital Payment Solution at COVID-19 Pandemic. 18–21.  
<https://doi.org/10.1109/IC2IE50715.2020.9274654>
- Munte, F. B., & Rahmah, M. (2017). PERLAKUAN AKUNTANSI ORGANISASI NIRLABA

TERKAIT DENGAN PSAK NO. 45 TAHUN 2017 PADA GEREJA HKBP MARANATHA. 45, 29–36.

Mursidi, R. (2020). Analisis Penerapan Psak No.45 Tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba (Studi Kasus Pada Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Kota Medan). 45.

Nasution, I. W., Kamilah, & Jannah, N. (2022). Pengaruh Transparansi, pengetahuan, dan religiusitas terhadap rendahnya minat masyarakat muslim untuk membayar zakat pada baznas kabupaten ashan. 2(1), 180–193.

Purba, S., Nazara, I., Gulo, S., Ratna, V., Sembiring, H., Sinurat, B., Arya, A., & Zebua, J. (2022). Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba Berdasarkan Isak 35 Pada Panti Asuhan Sendoro Medan. 2(1), 284–291.

Wiratnadi, P., Meitriana, M. A., & Indrayani, L. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan organisasi nirlaba ( Studi Pada organisasi kakak asuh bali). 11(2)